

Habibie pada sidang umum MPR RI tahun 1999: masalah di Timur selesai di Jakarta

Fahmi

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang 65145, fr.mantoo7@gmail.com

Abstract

Being a leader who reaps a lot of controversy, Habibie is able to deal with it. Resolving domestic issues is his responsibility. The East Timor issue is a severe case which he faces to its conclusion. Even so, the ending of the East Timor case made Habibie rejected at the time of the accountability trial. Habibie is considered to have neglected his responsibility in defending the KNRI.

Keywords

Habibie, MPR Session, 1999

Abstrak

Menjadi pemimpin yang menuai banyak kontroversi, Habibie mampu menghadapinya. Menyelesaikan persoalan dalam negeri sudah menjadi tanggung jawabnya. Persoalan Timor Timur merupakan kasus yang berat yang dihadapinya hingga tuntas. Meskipun demikian, berakhirnya kasus Timor Timur itulah membuat Habibie ditolak pada saat sidang pertanggung jawaban. Habibie dianggap sudah lalai dari tanggung jawabnya dalam mempertahankan KNRI.

Kata kunci

Habibie, Sidang MPR, 1999

Pendahuluan

Habibie dengan segudang prestasi membuat namanya semakin dikenal di Indonesia. sosok yang dermawan itu selalu memberikan aura positif bagi siapa yang melihatnya. Tokoh dengan pembawaan dan gaya bicara yang unik yang membuat ia sangat mudah untuk dikenal. tercatat sebagai salah satu orang jenius asal Indonesia. Habibie juga seorang presiden ketiga, yang menggantikan rezim Soeharto pada tahun 1998-1999. Menurut Pambudi (2017: 43) mantan Presiden RI ketiga,

Jenius ilmuwan konstruksi pesawat terbang, ini selalu menjadi berita hangat jika menginjakkan kakinya di tanah air, sepulang dari tanah idamannya Jerman. Habibie dengan segudang prestasi mampu menghadirkan selaksa harapan kemajuan teknologi demi kejayaan negeri ini. Sehingga mampu mengantarkan Habibie dipercayai untuk menjabat sebagai seorang Wakil Presiden RI bahkan sampai menjadi Presiden RI menggantikan “professor” politiknya Soeharto.

Habibie memimpin pada kondisi negara yang sedang banyak permasalahan. Rezim Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru, sehingga setelah Habibie menggantikan Soeharto, banyak yang mengatakan bahwa pemerintahannya merupakan lanjutan dari masa Orde Baru. Pada saat kepemimpinan Habibie banyak sekali permasalahan yang belum selesai pada masa orba. Tentunya permasalahan tersebut menjadi tantangan pada masa kepemimpinannya. Salah satunya yaitu pembebasan Timor Timur. Yang pada masa itu menjadi topik pembahasan yang fenomenal, bahkan sampai membuat Habibie tidak di terima pada saat pembacaan pidato di sidang MPR RI 1999. Sehingga pada artikel ini, penulis ingin membahas apa penyebab tidak terpilihnya Habibie menjadi presiden pada periode selanjutnya, dan untuk mengetahui bagaimana peran Habibie pada sidang MPR RI tahun 1999.

Metode

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan studi literatur. Studi literatur mengharuskan penulis untuk mencari data-data sekunder berupa buku, artikel, dan dokumen yang menunjang penulisan artikel ini. Menurut Melvianora (Tanpa Tahun: 2) penelitian dengan studi literatur tidak diharuskan untuk terjun kelapangan dan bertemu dengan responden, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen.

Dari pernyataan diatas, tidak ada paksaan bagi penulis untuk terjun langsung kelapangan. Tidak dianjurkan untuk bertemu langsung dengan responden. Buku, artikel, dan dokumen menjadi bahan atau sumber yang dapat digunakan dalam penulisan artikel ini. Keunggulan yang dapat dirasakan dengan menggunakan metode penelitian studi literature ini yaitu mampu mengefektivitasikan waktu. Langkah yang dapat dilakukan dalam penulisan ini adalah mengamati, menganalisis, mengkorelasikan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya, terakhir yaitu menyimpulkan makna yang terkandung dari berbagai sumber.

Dalam penulisan ini sumber yang penulis perlukan mencakup permasalahan Habibie sebagai sosok yang kontroversial, memimpin ditengah badai, dan jatuhnya Habibie sebagai kandidat pada sidang umum MPR RI 1999. Serta kajian yang memiliki keterkaitan dengan penulisan artikel ini. Sumber yang digunakan untuk menunjang dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yaitu berupa buku, artikel dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai rujukan.

Hasil dan Pembahasan

Habibie Pemimpin Yang Kontroversial

Menurut Aning (2006: 48) Habibie pun tampil menjadi Presiden ketiga RI pada periode yang paling rawan secara ekonomi maupun politik. Pada masa pemerintahan Soeharto krisis moneter menjadi konflik yang besar yang dihadapi oleh negara. Selain itu juga, ada kasus Timor Timur yang harus diselesaikan oleh Habibie pada masa itu. Warisan-warisan pada masa orde baru itu dapat diselesaikan Habibie dengan mulus, bahkan mendapatkan banyak respon positif. Menurut Noer (2016: 267) Rudy tak hanya

menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter, juga menyelesaikan masalah Timor Timur, dan menghasilkan UU yang menjadi fondasi penting Indonesia saat ini: UU kebebasan pers, UU anti monopoli atau persaingan sehat, UU partai politik, dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah.

Menyelesaikan banyak persoalan dalam negeri dan mampu merubah tatanan dalam negeri, merupakan perjuangan yang begitu berat yang dihadapi oleh Habibie. Sepanjang perjalanan hidupnya, dengan begitu luas tempat dia berkiprah, sosoknya yang dimensional, berkawan dengan siapapun, pro kontra dalam setiap langkah yang diambilnya, menunjukkan dia adalah sosok yang begitu kontroversi. Bahkan saat ia tidak lagi menjadi presiden atau gagal dalam pemilu 1999, dan kemudian memilih untuk bermukim di Jerman pun menuai kontroversi bagi rakyat Indonesia.

Penyebab Habibie Tidak Terpilih Pada Periode Selanjutnya

Selama menjadi Presiden RI Habibie menghadapi banyak persoalan besar mengenai negara. Habibie dapat dikatakan sebagai pemimpin yang tangguh dalam meneruskan persoalan-persoalan Orde Baru (ORBA) yang belum tuntas di masa kepemimpinan Soeharto. Pada masa itu, persoalan yang paling besar dihadapi oleh Habibie awal memerintah yaitu peristiwa Timor Timur dan krisis ekonomi. Banyak sekali terjadi aksi demonstrasi. Sehingga mengharuskan Habibie untuk memberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebaik-baiknya tindakan yang dilakukan oleh Habibie tetap saja mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat, bahkan tetap saja dianggap sebagai lanjutan dari Orde Baru. Menurut Pambudi (2007: 48) dari sekian sepak terjang kontroversialnya, kasus lepasnya TimorTimur agaknya menjadi sesuatu “kesalahan” fatal seorang presiden yang telah bersumpah dan berkewajiban mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melepaskan Timor Timur bukan semata-mata atas kesalahan Habibie, namun ini merupakan keputusan yang dipilih berdasarkan hati nurani rakyat Timor Timur. Habibie sudah berusaha mempertahankan Timor Timur dengan memberikan tawaran otonomi yang luas, namun rakyat Timor Timur tetap bersih keras untuk merdeka. Hal itu sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Atas dasar itu, maka diharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan melakukan Sidang Umum dapat kiranya menampung aspirasi rakyat Timor Timur tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam konstitusi kita (Makka, 2018: 344).

Sebagai bangsa yang besar kita harus menghargai aspirasi dan hak asasi warga Timor Timur untuk menyatakan dirinya sebagai negara sendiri. Meskipun ini pahit bagi RI, namun pilihan rakyat Timor Timur untuk merdeka bukan lagi urusan pemerintah RI. Keputusan ini sudah melalui jajak pendapat. Habibie sudah mencoba mempertahankan, dan melakukan yang terbaik. Pada pemerintahan Habibie yang menggantikan Soeharto, Habibie berhasil menuntaskan persoalan Timor Timur yang kala itu sulit untuk dituntaskan oleh Soeharto. Namun, keputusan yang diambil oleh Habibie ini sangatlah fatal. Sehingga

hal tersebut yang menjadi alasan Habibie tidak dapat diterima pada sidang pertanggung jawaban pada sidang MPR RI hasil pemilu 1999.

Namun, penolakan tersebut justru membuat Habibie untuk terus maju dalam pemilu terbaik setelah pemilu 1955. Sebagai seorang Presiden RI yang sedang menjabat tentunya memiliki ambisi untuk tetap berada diposisi itu, pada pemilu 1999 sangat menguji nyali Habibie sebagai kandidat calon presiden. Meskipun pada akhirnya Habibie harus lengser akibat kesalahan fatal yang dilakukannya, kesalahan tersebut yaitu pada saat referendum Timor Timur memilih merdeka. Habibie kalah dalam pemilu karena dianggap telah melakukan dosa besar, Habibie sudah melanggar sumpahnya pada saat pelantikan presiden 1998. Sumpah tersebut yaitu berkewajiban mempertahankan keutuhan NKRI. Setelah lengser Habibie pun pensiun dan menjadi warga masyarakat biasa.

Habibie pada Sidang MPR RI Tahun 1999

Tiada hari tanpa demonstrasi yang dilalui oleh Habibie, namun sudah menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan. Selain itu Habibie juga memberikan perubahan-perubahan baru yang membebaskan semua kalangan dalam segala bidang, termasuk pers dan politik. Hal tersebut merupakan bentuk dari perwujudan impian Habibie untuk menciptakan negara yang demokrasi. Hal ini didukung dengan pendapat dari Pambudi (2017: 47) ketika Habibie menjabat Presiden hampir tidak ada hari tanpa demonstrasi. Sehingga mendesak Habibie untuk merespon tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan politik.

Kekalahan Habibie pada sidang umum MPR RI mengenai pemilu sudah terlihat pada saat Habibie berhasil menuntaskan masalah Timor Timur. Habibie dianggap telah melakukan kesalahan yang fatal dan sudah melanggar sumpahnya, dari kesalahan itulah yang menyebabkan Habibie tidak dapat lanjut pada pemilu periode selanjutnya. Sehingga mengantarkan Habibie ditolak pada saat pidato pertanggungjawaban dihadapan para MPR RI.

Menurut Pambudi (2007:48) bahwa kesalahan ini mengakibatkan penolakan terhadap pidato pertanggung jawaban Habibie dalam sidang Umum MPR RI hasil pemilu 1999. Selain itu dalam menghadapi Pemilu 1999 Habibie terdesak dengan adanya permasalahan yang timbul dari rakyat Papua yang membentuk sebuah gerakan, gerakan tersebut bernama Gerakan Kebangkitan Baru Orang Papua. Gerakan tersebut mengeluarkan beberapa pernyataan politik. salah satunya berbunyi “Kami Bangsa Papua Barat menyatakan tidak ikut serta dalam Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999”. Pernyataan tersebut diungkapkan Pekey (2018:140) dalam bukunya yang berjudul “Papua Mencari Jalan Perdamaian”.

Menurut Ma’ruf (2013: 139) menjelang pemilu 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 dan setelah diverifikasi oleh Tim II Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi 98 partai. Selanjutnya, pada 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilu multipartai. Kemudian diadakan pemilihan partai lagi, yang nantinya akan bersaing untuk memenangkan pemilu. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh

Habibie dalam memberikan kebebasan politik yaitu dengan membebaskan semua partai politik turut andil dalam pemilihan umum.

Dari Sidang Istimewa kemudian 7 Juni 1999, berdasarkan hasil perhitungan suara, dari 48 partai ada tujuh partai dianggap sebagai pemenang pemilu. Yaitu: PDIP, Golkar, PPP, PAN, PKB, PBB, dan PK. Kemudian ini dimenangkan oleh Partai Golkar dan PDIP. Suaranya pun tidak beda jauh. Setiap partai politik akhirnya memiliki perwakilan di DPR. Mulai dari sinilah mereka mengatur taktik untuk menguasai bangku pemerintahan.

Berakhirnya pesta demokrasi Parpol tersebut, terjadi SU MPR mengenai pemilihan presiden. Untuk memenuhi tuntutan reformasi, ada Sidang Umum MPR RI yang dilaksanakan pada 1 oktober 1999, Habibie sebagai presiden melangsungkan Pidato pertanggungjawaban pada tanggal 14 Oktober 1999, secara mengesankan ditolak MPR dalam rapatnya pada tanggal 20 Oktober 1999. Dengan penolakan ini, Habibie harus mengurungkan niatnya untuk masuk dalam bursa pencalonan presiden RI periode 1999-2004, hal ini diungkapkan oleh Dienaputra, dkk dalam artikelnya (2011: 184).

Hingga akhirnya Habibie mengundurkan diri sebagai kandidat calon presiden tersebut dan menghasilkan Megawati dan Abdurahman Wahid sebagai kandidat Calon presiden RI periode 1999-2004. Dan partai politik yang mendukung Habibie akhirnya mengambil poros tengah dan mendukung Abdurahman Wahid. Semasa pemerintahannya kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa Habibie berdasarkan konsep demokrasi. Belajar dari kesalahan pemerintahan sebelumnya, ia berusaha menjadi pemimpin yang cermat, cepat, telaten, rasional dan reformis. Dalam menghadapi persoalan ia berusaha menjadi arif dan bijaksana, mengingat harapan 200 juta lebih penduduk Indonesia.

Kesimpulan

Pemimpin seharusnya arif dan bijaksana dalam menghadapi sebuah persoalan dalam negara. Menjadi pautan semua rakyat merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dihadapi. Memberikan kebijakan-kebijakan yang berasas demokrasi dan berkemanusiaan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Ketika ada kesalahan sistem dalam sebuah negara, maka rubahlah sistem itu. Jangan menyalahkan siapapun tapi mencoba untuk sadar dan selalu optimis untuk menghadapinya. Pantang putus asa meski diberi komentar yang negatif. Salah satu dasar atau prinsip dari kebijaksanaan antara lain tertutup.

Daftar Rujukan

- Aning, F. (2006). 100 Tokoh yang mengubah Indonesia. Yogyakarta: Penerbit NARASI
- Dienaputra, Reiza D, dkk. 2011. Prosesi peralihan kekuasaan dari Habibie Ke Abdurahman Wahid: sebuah penelitian awal. *Jurnal Sosiohumaniora*. (online) diakses pada 21 Maret 2020. <https://journal.unpad.ac.id/>
- Ma'ruf, A. 2013. B.J Habibie Guru terbesar saya adalah otak saya. Jogjakarta: Ar-Ruza Media
- Makka, A, Makmur. 2018. Mr.Crack dari Parepare. Jakarta: Republika P

Melvianora. Tanpa Tahun. Penulis karya tulis ilmiah dengan studi literatur. Makalah Penulis UPT
Balai Penyuluhan Pertanian

Noer, Gina, S. (2016). Rudy kisah masa muda sang visioner. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka

Pambudi, A. 2017. Kontroversi kudeta Prabowo. Yogyakarta: Media Pressindo

Pekey, F. 2018. Papua mencari jalan perdamaian telaah konflik dan resolusi di bumi
cendrawasih. Jakarta: PT Kompas Buku Nusantara